

**PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA OLEH ANAK
(Studi di BAPAS Surakarta)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Hukum Fakultas Hukum

Disusun Oleh:

ADIMAS RIZKY RESTU PRADANA

C 100120037

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA OLEH ANAK
(Studi BAPAS di Surakarta)**

PUBLIKASI ILMIAH

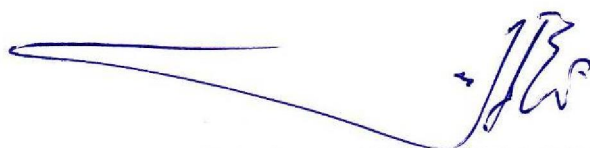
Oleh:

ADIMAS RIZKY RESTU PRADANA

C 100120037

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Pembimbing



(Muchamad Iksan, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

**PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA OLEH ANAK
(Studi di BAPAS Surakarta)**

Oleh:

ADIMAS RIZKY RESTU PRADANA

C 100120037

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Senin, 2 April 2018
dan dinyatakan telah memenuhi syarat


Dewan Penguji:

1. Muchamad Iksan, S.H., M.H.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Hartanto, S.H., M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Kuswardani, S.H., M.H.
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Dekan,
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta




Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati SH., M.Hum.
NIK. 537

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 25 Maret 2018

Penulis



ADIMAS RIZKY RESTU PRADANA

C 100120037

**PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA OLEH ANAK
(Studi di BAPAS Surakarta)**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pembimbing kemasyarakatan dalam penyelesaian perkara pidana oleh anak dan hambatan-hambatan yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam penyelesaian perkara pidana oleh anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknis analisis data ini merupakan analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Balai Pemasyarakatan Surakarta sebagai salah satu penegak hukum khususnya dalam pembimbingan terhadap anak nakal, dalam menjalankan perannya tersebut dilakukan melalui tiga tahap, yaitu tahap pra adjudikasi, tahap adjudikasi, dan tahap post adjudikasi. Hambatan-hambatan yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam penyelesaian perkara pidana oleh anak antara lain: kelemahan aturan hukum yang berlaku terhadap tindak pidana anak, kurangnya koordinasi diantara sesama aparat penegak hukum, rendahnya kualitas sumber daya manusia di Balai Pemasyarakatan Surakarta, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, wilayah hukum Balai Pemasyarakatan Surakarta yang sangat luas meliputi eks Karesidenan Surakarta mengakibatkan pelaksanaan peran Balai Pemasyarakatan kurang optimal, keluarga klien anak yang tidak kooperatif dengan petugas pembimbing kemasyarakatan, dan alokasi anggaran dan dana yang sangat minim.

Kata Kunci: pembimbing kemasyarakatan, pidana, anak.

Abstract

This study aims to know: the role of the supervising officer community in the settlement of criminal cases by the child and the constraints faced by the Community Counselor in the settlement of criminal cases by the child. This research is empirical law research. Methods of data collection through library and field study. Technical analysis of this data is an interactive analysis. The results showed that Surakarta Central Penitentiary as one of the law enforcers especially in guidance of bad children, in carrying out its role is done through three stages, namely pre-adjudication stage, stage of adjudication, and post-adjudication stage. The barriers faced by the supervising officer community in the settlement of criminal cases by the child are: weakness of law rule that is applied to child crime, lack of coordination among law enforcers, low quality of human resources at Surakarta Central Penitentiary, lack of adequate facilities and infrastructures, the Surakarta regency's vast jurisdiction covering the former Surakarta residency has resulted in an inadequate role of the Central Penitentiary, the family of uncooperative child clients with supervising officer community, and very minimal budget and funding allocations.

Keywords: supervising officer community, criminal, child.

1. PENDAHULUAN

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.¹ Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau disebut dengan UUSPPA, *“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”*.

Penyimpangan perilaku melanggar hukum yang dilakukan anak yang menyebabkan anak harus berhadapan dengan hukum disebabkan berbagai faktor. Antara lain dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan IPTEK, serta perubahan gaya hidup telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. Sehingga akan sangat berpengaruh pada nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh bimbingan kasih sayang, pembinaan dalam pengembangan sikap dan perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan menyebabkan anak mudah terseret pada pergaulan yang kurang sehat. Sehingga akan merugikan perkembangan pribadinya. Bahkan hal tersebut dapat membuka peluang bagi anak untuk melakukan tindak pidana. Dari semua faktor-faktor tersebut telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan ini akan sangat berpengaruh pada perilaku atau tingkah laku si anak.²

Keberadaan anak yang demikian di lingkungan masyarakat memang perlu mendapatkan perlindungan khususnya anak yang berhadapan dengan hukum karena pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi dirinya dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial. Anak harus mendapatkan perlindungan oleh individu, kelompok, organisasi sosial dan pemerintah. Khususnya oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang mempunyai peranan penting terhadap kesejahteraan anak dan masa depan anak dari berbagai

¹ Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 1.

² Shanti Beliyana. 1995. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Jakarta: Liberty, hlm. 107.

kesalahan penerapan hukum terhadap anak yang menghadapi masalah dengan hukum terlebih lagi dalam proses penyelesaian perkara pidana oleh anak.³ Pembimbing Kemasyarakatan adalah Petugas kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang melakukan bimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan.⁴

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pembimbing kemasyarakatan dalam penyelesaian perkara pidana oleh anak dan hambatan-hambatan yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam penyelesaian perkara pidana oleh anak.

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris.⁵ Jenis penelitian adalah deskriptif,⁶ yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara jelas tentang hal-hal yang berkaitan dengan peran Pembimbing Pemasyarakatan dalam penyelesaian perkara pidana oleh anak di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Surakarta.

Sumber data penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan dengan wawancara di Bapas Pemasyarakatan (BAPAS) Surakarta dan data sekunder berupa bahan-bahan baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan pejabat dan petugas Pembimbing Kemasyarakatan, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dan selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yakni menarik fakta atau kesimpulan yang bersifat umum, untuk dijadikan fakta atau kesimpulan umum yang bersifat khusus⁷ sehingga dapat memberikan jawaban yang jelas atas permasalahan dan tujuan penelitian.

³ Humaidi Usai. 2012. *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Anak*. Mataram: Fakultas Hukum Mataram, hlm. 1.

⁴ Lilik Mulyadi. 2005. *Pengadilan Anak Di Indonesia Teori Praktek Dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 24.

⁵ Metode Penelitian Hukum Empiris yaitu, metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Lihat uai.ac.id/2011/04/13/pemikiran-ulang-atas-metodologi-penelitian-hukum/, diakses pada tanggal 1 Maret pukul 17.40 wib.

⁶ Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, hlm. 10.

⁷ Sutrisno Hadi. 2007. *Metodologi Penelitian Resreach*. Jakarta: PT. Moyo Segoro Agung, hlm. 56.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penyelesaian Perkara Pidana oleh Anak

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sutomo,⁸ peran PK adalah memberikan laporan hasil penelitian sebagai bahan pertimbangan hakim. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa tugas pembimbing kemasyarakatan adalah membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA.⁹

Pembimbing kemasyarakatan (PK) mempunyai peranan yang sangat strategis dalam penanganan terhadap anak nakal, hal ini terjadi karena pembimbing kemasyarakatan mempunyai 3 (tiga) peranan yang melekat dalam mata rantai proses penegakan hukum, yaitu:

3.1.1 Pra Ajudikasi

Pra ajudikasi merupakan suatu tahap pada saat dimulainya proses penyidikan terhadap anak nakal oleh kepolisian. Dalam tahap ini pembimbing kemasyarakatan melaksanakan tugasnya untuk membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) atas permintaan pihak penyidik kepolisian.¹⁰ Hasil laporan penelitian kemasyarakatan tersebut nantinya juga bermanfaat untuk membantu jaksa dalam membuat tuntutan dan membantu hakim dalam membuat putusan terhadap anak nakal tersebut. Apa sebenarnya Litmas atau *Case Study* itu tiada lain¹¹: untuk menentukan diagnosa, atau assesment maupun untuk penentuan terapi, langkah-langkah apa setelah ada litmas sebagai hasil penelitian masalah sosial yang dihadapi klien, dan strategi tugas yang bagaimana, serta model-model pembinaan yang tepat bagi klien yang bersangkutan maupun untuk tahanan, Napi,

⁸ Sutomo, Kepala Kasubsie Bimbingan Klien Anak di Balai Pemasyarakatan Surakarta, *Wawancara Pribadi*, pada 31 Oktober 2017, jam 10.30 WIB di Kantor Bapas Surakarta.

⁹ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 65.

¹⁰ CM Marianti Soewandi. 2003. *Buku Materi Kuliah Akademi Ilmu Pemasyarakatan, Bimbingan dan Penyuluhan Klien*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hlm. 74

¹¹ Sutomo, Kepala Kasubsie Bimbingan Klien Anak di Balai Pemasyarakatan Surakarta, *Wawancara Pribadi*, pada 31 Oktober 2017, jam 10.30 WIB di Kantor Bapas Surakarta.

dan Anak didik. Juga bermanfaat dalam pelaksanaan proses pemberian bantuan, atau dapat dikatakan sebagai proses intervensi, ikut campur dalam pemecahan masalah dan berguna untuk evaluasi.

Dalam membuat laporan penelitian kemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan berperan sangat strategis dan penting sebagai seorang peneliti. Dalam melakukan proses penelitian di lapangan, pembimbing kemasyarakatan dituntut untuk mampu mencari data, fakta, dan informasi secara akurat, tepat, dan objektif tentang latar belakang masalah dan pribadi anak nakal yang menjadi kliennya, keluarga dan lingkungan yang lebih luas dimana anak nakal tersebut bersosialisasi. Untuk menjalankan peran tersebut dalam rangka menghasilkan kualitas hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) yang baik, pembimbing kemasyarakatan melakukan langkah-langkah profesional dengan memperhatikan prosedur standar pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang mencakup: 1) Pengumpulan informasi. Dalam pengumpulan informasi, pembimbing kemasyarakatan mengidentifikasi sumber-sumber informasi yang sesuai dengan tujuan pembuatan laporan, 2) wawancara, 3) analisa informasi, dan 4) penulisan laporan.

3.1.2 Ajudikasi

Setelah laporan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) selesai dibuat, maka akan diserahkan kepada pihak penyidik dari kepolisian yang selanjutnya akan diberkaskan guna dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri. Apabila Jaksa Penuntut Umum telah selesai melakukan pemeriksaan kepada anak nakal, maka selanjutnya akan didaftarkan untuk proses persidangan di pengadilan hingga turunnya penetapan sidang.¹² Dalam setiap proses sidang di pengadilan, anak nakal atau klien anak wajib didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan (PK), sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi: *“Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak”*.

¹² Asika Mahargini. 2016. Model Sistem Peradilan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dengan Pendekatan Diversi dan Restoratif Justice Studi Kasus di Bapas Kota Surakarta, *Jurisprudence*, Vol. 6, No. 1, hlm. 16-27.

3.1.3 Post Ajudikasi

Apabila anak nakal atau klien anak telah dijatuhi putusan atau vonis oleh hakim, maka pembimbing kemasyarakatan masih mempunyai tugas untuk membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal atau klien anak tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 65 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:

- “d. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan dan melakukan pendampingan, pembimbingan; dan
- e. pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.”

Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor E-39-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan, bimbingan klien dilaksanakan melalui tiga tahap berdasarkan kebutuhan dan permasalahan klien yang meliputi: 1) Bimbingan tahap awal, yang terdiri dari: penelitian Kemasyarakatan, menyusun rencana program bimbingan, pelaksanaan program bimbingan, dan penilaian pelaksanaan program tahap awal dan penyusunan rencana bimbingan tahap lanjutan. 2) Bimbingan tahap lanjutan, yang terdiri dari: pelaksanaan program bimbingan dan penilaian pelaksanaan program tahap lanjutan dan penyusunan rencana bimbingan tahap akhir. 3) Bimbingan tahap akhir, yang terdiri dari: pelaksanaan program bimbingan, meneliti dan menilai keseluruhan hasil pelaksanaan program bimbingan, mempersiapkan klien untuk menghadapi akhir masa bimbingan dan mempertimbangkan akan kemungkinan pelayanan bimbingan tambahan (*after care*), mempersiapkan surat keterangan akhir masa bimbingan klien, dan mengakhiri masa bimbingan klien dengan diwawancarai oleh Kepala Balai Pemasyarakatan.

3.2 Hambatan-hambatan yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penyelesaian Perkara Pidana oleh Anak

Dalam menjalankan tugasnya sebagai petugas pembimbing kemasyarakatan yang mendampingi anak nakal yang menjadi kliennya, pembimbing kemasyarakatan sering kali masih dihadapkan pada kendala- kendala

baik yang bersifat teknis maupun nonteknis. Kendala-kendala tersebut dialami baik dalam pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan maupun pada tahap pra ajudikasi, ajudikasi, hingga tahap post ajudikasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sutomo yang pada saat penelitian dilakukan sedang menjabat sebagai Kepala Kasubsie Bimbingan Klien Anak di Balai Pemasyarakatan Surakarta maupun dengan pembimbing kemasyarakatan lainnya yang bertugas pada bagian Bimbingan Klien Anak, dapat diperoleh informasi mengenai kendala-kendala yang dialami pembimbing kemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya, yaitu:

3.2.1 Aturan Hukum

Tidak adanya aturan hukum yang tegas serta sanksi yang dijatuhkan apabila dalam penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Kadang-kadang masih terdapat adanya perkara pidana anak tanpa adanya laporan penelitian tetapi perkara anak tersebut tetap jalan. Sidang anak tetap jalan akan tetapi tanpa dihadapkannya pembimbing kemasyarakatan atau pembimbing kemasyarakatan tidak diberi tempat duduk khusus ataupun tidak diberi kesempatan untuk membacakan laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Dalam Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan jelas menyatakan bahwa: *“Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak”*. Kata wajib dalam bunyi Pasal tersebut mengandung arti bahwa setiap sidang yang berkaitan dengan anak nakal, kehadiran Pembimbing Kemasyarakatan sebagai salah satu pihak dalam persidangan merupakan mutlak adanya. Karena tugas dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut adalah sebagai pendamping bagi anak nakal selama proses hukumnya berlangsung.

3.2.2 Koordinasi

Dalam menjalankan tugasnya melakukan pembimbingan terhadap anak nakal, Balai Pemasyarakatan memang hanya bersikap pasif. Hal tersebut mengandung arti bahwa Balai Pemasyarakatan hanya menunggu jika ada instansi lain, seperti Kepolisian, Kejaksaan, maupun Pengadilan mengajukan permintaan

untuk dibuatkan laporan penelitian kemasyarakatan terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana. Dengan demikian peran Balai Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap anak nakal sangat ditentukan oleh aparat penegak hukum yang lain yang menangani perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Perbedaan pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai peradilan terhadap anak, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara aparat penegak hukum yang satu dengan yang lainnya, mengakibatkan tidak adanya kesepahaman dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan anak nakal. Perbedaan pemahaman tersebut mengakibatkan tidak adanya koordinasi yang jelas antara Balai Pemasyarakatan dengan aparat penegak hukum lainnya dalam menangani perkara anak.

3.2.3 Sumber Daya Manusia

Keterbatasan sumber daya manusia secara kualitas dari petugas Balai Pemasyarakatan merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan peran Balai Pemasyarakatan dalam pembinaan terhadap anak nakal. Kinerja petugas maupun pegawai dari Balai Pemasyarakatan yang kurang maksimal dan terjebak dengan adanya rutinitas dalam melaksanakan tugas sehari-harinya di kantor sehingga bersifat monoton dan tidak berkembang karena perkara anak nakal yang ditangani oleh Balai Pemasyarakatan Surakarta relatif sedikit. Selain itu, kurang atau tidak adanya pendidikan dan latihan dalam hal penanganan perkara pidana anak terhadap pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Surakarta yang berakibat pada tidak berkembangnya pola pikir petugas Balai Pemasyarakatan. Hal tersebut berakibat pula pada mental para petugas Balai Pemasyarakatan Surakarta yang masih sering merasa rendah diri apabila duduk atau berdampingan dengan jaksa, penasehat hukum, atau hakim karena merasa tidak profesional.

3.2.4 Sarana dan Prasarana

Pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya untuk menangani perkara pidana yang dilakukan oleh anak, baik itu guna menyusun

laporan penelitian kemasyarakatan maupun mengikuti dan menghadiri persidangan anak kurang didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Balai Pemasyarakatan Surakarta dalam melakukan proses pembimbingan terhadap anak nakal bisa dibilang cukup memprihatinkan.

Menurut penelitian yang penulis lakukan sendiri di Balai Pemasyarakatan Surakarta, sarana dan prasarana yang ada di sana sangat berbeda jauh dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang ada pada kantor penegak hukum lainnya, seperti pada kantor polisi maupun kantor kejaksaan. Salah satu contohnya adalah dalam pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan oleh petugas Balai Pemasyarakatan Surakarta, hanya tersedia satu buah unit komputer tua pada tiap-tiap ruangan atau tiap-tiap bagian unit kerjanya. Keterbatasan jumlah komputer tersebut mengakibatkan para pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Surakarta mau tidak mau harus menggunakan komputer pribadi untuk mengerjakan tugasnya tersebut. Keterbatasan tersebut tentu saja mengakibatkan kurang maksimalnya kinerja petugas Balai Pemasyarakatan. Padahal petugas pembimbing kemasyarakatan dituntut untuk bertindak cepat karena dipaksakan dengan masa penahanan tersangka atau terdakwa anak yang relatif singkat waktu penahanannya.

3.2.5 Wilayah Kerja yang Luas

Wilayah hukum Balai Pemasyarakatan Surakarta terdiri dari Kotamadya Surakarta, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali. Wilayah hukum tersebut termasuk pula batas-batas paling luar dari masing-masing kabupaten. Dengan adanya keterbatasan sarana berupa kendaraan dinas, maka pada saat ada tugas kunjungan ke kediaman klien anak yang tempat tinggalnya sangat jauh dan terpencil, untuk menjangkau daerah-daerah yang terpencil tersebut sangat sulit untuk dilakukan, apalagi bagi petugas Balai Pemasyarakatan perempuan.

3.2.6 Faktor Keluarga Klien

Setiap anak merupakan tanggung jawab orang tuanya masing-masing. Akan tetapi tidak semua orang tua mau bertanggung jawab terhadap anaknya yang

telah menjadi anak nakal. Bagi orang tua yang mempunyai anak yang susah diatur dan sudah berulang kali melakukan tindak pidana, seringkali sudah tidak mau bertanggung jawab lagi terhadap anaknya tersebut. Hal ini tentu saja menyulitkan petugas Balai Pemasyarakatan dalam melakukan pendampingan terhadap anak nakal tersebut, karena bagaimanapun juga orang tua tetap berperan dalam penyelesaian perkara yang melibatkan anaknya, misalnya: ketersediaan orang tua untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan anaknya, dan sebagainya. Apabila orang tua sudah tidak mau tahu lagi dengan perkara yang sedang dialami anaknya, tentu saja orang tua tersebut tidak mau memberikan keterangan sama sekali. Hal tersebut dapat menyulitkan petugas pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan dalam membuat laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas). Padahal laporan penelitian kemasyarakatan merupakan suatu unsur yang harus ada dalam setiap proses perkara yang melibatkan anak nakal.

3.2.7 Keterbatasan Alokasi Anggaran atau Dana

Anggaran atau dana merupakan sesuatu yang sangat vital dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya dana mungkin suatu pekerjaan tidak dapat dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sutomo yang pada saat penelitian dilakukan sedang menjabat sebagai Kepala Subseksi Bimbingan Klien Anak, diperoleh informasi bahwa kesenjangan anggaran antara Balai Pemasyarakatan dengan aparat penegak hukum yang lain sangat jauh, baik alokasi anggaran operasional, administrasi, maupun kesejahteraan pegawai.

Dengan adanya kendala-kendala seperti yang telah diuraikan di atas, maka tentu saja harus ada pemecahan masalah atau solusi yang harus dipikirkan guna menghadapi kendala-kendala tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sutomo selaku Kepala Kasubsie Bimbingan Klien Anak di Balai Pemasyarakatan Surakarta, dapat diperoleh informasi solusi-solusi terhadap kendala-kendala tersebut di atas, yaitu:

3.2.1 Aturan Hukum

Perlu adanya hakim pengawas dan pengamat (wasmat) untuk berperan aktif dalam melaksanakan fungsinya sebagai hakim wasmat. Sehingga pelaksanaan persidangan anak dapat berjalan sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 11 tahun 2012. Antara hakim, jaksa, penasehat hukum dan petugas pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan berjalan seiring selaras dengan aturan hukum yang telah ada dan apabila unsur-unsur tersebut tidak ada maka harus ada sanksi, hal itu diperlukan guna menjaga atau melindungi hak anak sebagai terdakwa dan peran aktif dari masing-masing aparat dalam melaksanakan fungsi dan perannya dalam melaksanakan persidangan anak di Pengadilan.

3.2.2 Koordinasi

Perlu peningkatan koordinasi antara sesama aparat penegak hukum khususnya dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Baik itu jaksa anak, hakim anak dan Balai Pemasyarakatan mengkoordinasikan guna membentuk satu definisi dan kesepahaman dalam penanganan perkara anak nakal, meskipun jika dilihat dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, peran Balai Pemasyarakatan dalam penyusunan laporan penelitian kemasyarakatan sifatnya hanya menunggu permintaan dari instansi lain.

3.2.3 Sumber Daya Manusia

Pembimbing Kemasyarakatan dituntut untuk bertindak profesional dalam melaksanakan tugasnya yang memiliki pola pikir maju sesuai dengan perkembangan jaman, tidak terjebak adanya rutinitas dalam pelaksanaan tugas. Guna meningkatkan kemampuan petugas pembimbing kemasyarakatan yang handal dan profesional sebaiknya petugas kemasyarakatan diikutsertakan dalam mengikuti pendidikan dan latihan teknis pemasyarakatan yang khusus bagi pembimbing kemasyarakatan atau diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal di universitas-universitas terutama yang berkaitan dengan bidang tugasnya. Dengan modal pendidikan yang cukup dan profesional, pembimbing kemasyarakatan merasa percaya diri dan tidak merasa rendah diri jika duduk bersama dalam melaksanakan tugas di persidangan anak.

3.2.4 Sarana dan Prasarana

Pembimbing Kemasyarakatan harus mengadakan kunjungan rumah (*home visit*) di tempat tinggal klien dan ke sekolah, sehingga diperlukan kendaraan dinas. Dengan adanya sarana dan prasarana tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan dapat

melaksanakan tugas dalam penyusunan laporan penelitian kemasyarakatan dengan tepat waktu dan dapat menghadiri persidangan anak sesuai dengan jadwal yang disampaikan ke Balai Pemasyarakatan.

3.2.5 Wilayah Kerja yang Luas

Berdasarkan hasil wawancara, didapatkan pula solusi atau cara lain yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala wilayah kerja dari Balai Pemasyarakatan Surakarta yang sangat luas, yaitu dengan membangun cabang Balai Pemasyarakatan yang ada di tiap-tiap Kabupaten ataupun di tiap-tiap Kecamatan. Dengan wilayah kerja yang dipersempit diharapkan pelayanan terhadap klien Pemasyarakatan dapat dilakukan dengan optimal tanpa terkendala jauhnya jarak yang harus ditempuh untuk melakukan bimbingan kepada klien Pemasyarakatan. Apabila salah satu solusi yang telah diuraikan di atas dapat terlaksana dengan baik niscaya Balai Pemasyarakatan Surakarta dapat menjalankan perannya dengan optimal.

3.2.6 Faktor Keluarga Klien

Untuk mengatasi kendala yang berasal dari faktor keluarga klien dapat dilakukan dengan melakukan pendekatan secara personal terhadap keluarga klien. Untuk itu, maka setiap Pembimbing Kemasyarakatan harus mempunyai kemampuan untuk dapat berinteraksi secara persuasif agar keluarga klien mau berperan dalam penyelesaian perkara yang melibatkan anggota keluarganya.

Solusi lain yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada keluarga klien mengenai peran-peran dan tugas-tugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan yang intinya adalah untuk mendampingi dan membantu anak nakal dalam menyelesaikan perkara yang dihadapinya agar dicapai solusi yang terbaik bagi anak nakal tersebut. Dengan begitu diharapkan pihak keluarga klien bersedia untuk berjuang bersama demi kepentingan anak nakal yang menjadi anggota keluarganya.

3.2.7 Keterbatasan Alokasi Anggaran atau Dana

Peningkatan anggaran dan dana kepada Balai Pemasyarakatan dari pemerintah harus ditingkatkan. Hal tersebut dilakukan agar Balai Pemasyarakatan Surakarta dapat menjalankan perannya dengan optimal. Kesenjangan sosial antara

Balai Pemasyarakatan dengan aparat-aparat penegak hukum lainnya dapat diperkecil dengan peningkatan anggaran dari pemerintah yang dialokasikan kepada Balai Pemasyarakatan sehingga dapat tercapai kesetaraan antara Balai Pemasyarakatan dengan Penegak hukum lainnya.

4. PENUTUP

Balai Pemasyarakatan Surakarta sebagai salah satu penegak hukum khususnya dalam pembimbingan terhadap anak nakal, dalam menjalankan perannya tersebut dilakukan melalui tiga tahap, yaitu:

Tahap pra ajudikasi, yaitu tahap pada saat dimulainya proses penyidikan oleh kepolisian terhadap anak nakal. Dalam tahap ini peran Balai Pemasyarakatan Surakarta melalui Pembimbing Kemasyarakatan (PK) adalah membuat laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) atas permintaan pihak kepolisian.

Tahap ajudikasi, yaitu tahap pada saat perkara yang melibatkan anak nakal telah memasuki proses persidangan. Pada tahap ini peran Balai Pemasyarakatan melalui pembimbing kemasyarakatan adalah mendampingi anak nakal yang menjadi kliennya dalam setiap proses persidangan;

Tahap post ajudikasi, yaitu tahap pada saat setelah perkara yang melibatkan anak nakal diputus oleh hakim. Pada tahap ini peran Balai Pemasyarakatan Surakarta melalui pembimbing kemasyarakatan adalah untuk membimbing, membantu, dan mengawasi klien anak dalam menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya.

Balai Pemasyarakatan Surakarta dalam menjalankan perannya dalam melakukan pembimbingan terhadap anak nakal masih banyak menemui kendala-kendala yang dapat menghambat pelaksanaan perannya, yaitu:

Kelemahan aturan hukum yang berlaku terhadap tindak pidana anak, yang didalamnya tidak disebutkan adanya sanksi apabila tidak ada kelengkapan administrasi dalam menyelesaikan perkara pidana anak khususnya dalam proses persidangan;

Kurangnya koordinasi diantara sesama aparat penegak hukum terutama yang khusus menangani perkara pidana yang dilakukan anak sehingga

menimbulkan eksese mau menang sendiri dalam menangani perkara pidana anak terutama di persidangan;

Rendahnya kualitas sumber daya manusia di Balai Pemasyarakatan Surakarta sehingga dalam menangani perkara pidana anak tidak bertindak secara profesional. Hal itu mengakibatkan petugas Balai Pemasyarakatan menjadi rendah diri jika mengikuti persidangan anak di Pengadilan yang berhadapan dengan sesama aparat penegak hukum lainnya baik itu jaksa, hakim, ataupun penasehat hukum.

Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai sehingga dalam penanganan perkara pidana anak belum dapat melaksanakan tugasnya dalam penyusunan laporan penelitian kemasyarakatan yang tidak tepat waktu. Hal itu disebabkan tidak atau kurang didukung adanya sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan perannya sebagai pembimbing kemasyarakatan, baik untuk mencari data dalam penyusunan laporan penelitian kemasyarakatan ataupun dalam menghadiri persidangan;

Wilayah hukum Balai Pemasyarakatan Surakarta yang sangat luas meliputi eks Karesidenan Surakarta mengakibatkan pelaksanaan peran Balai Pemasyarakatan kurang optimal karena kesulitan dalam menjangkau daerah-daerah pelosok perbatasan dari masing-masing daerah sehingga tidak semua klien anak yang menghadapi perkara pidana dapat dilayani oleh Balai Pemasyarakatan Surakarta;

Keluarga klien anak yang tidak kooperatif dengan petugas pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Surakarta juga dapat menjadi kendala dalam mendapatkan informasi mengenai klien anak guna menyusun laporan penelitian kemasyarakatan (litmas), sehingga penyusunan laporan penelitian kemasyarakatan dapat terhambat;

Alokasi anggaran dan dana yang sangat minim kepada Balai Pemasyarakatan Surakarta dalam menjalankan peran dan fungsinya merupakan kendala nonteknis yang sangat terasa. Perbedaan yang sangat mencolok antara anggaran kepada Balai Pemasyarakatan dengan penegak hukum lainnya menjadikan adanya kesenjangan sosial yang sangat jauh antara Balai Pemasyarakatan dengan penegak hukum lainnya.

Sebagaimana temuan penelitian, petugas pembimbing kemasyarakatan telah melaksanakan tugas dan kewajibannya membantu tersangka anak. Hal itu sejalan dengan pendapat Karim bahwa PK memberikan motivasi bagi tersangka anak. Tersangka seusia anak di bawah umur memerlukan dukungan moril dan motivasi yang kuat sehingga kesalahan yang pernah dilakukan dapat diambil hikmah. Selain motivasi dan dukungan, PK juga perlu memberikan pengertian-pengertian positif bahwa hidup bukan sebagai akhir ketika melakukan kesalahan tersangka anak masih memiliki peluang agar dapat memperbaiki diri dan berguna di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Asika Mahargini. 2016. Model Sistem Peradilan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dengan Pendekatan Diversi dan Restoratif Justice Studi Kasus di Bapas Kota Surakarta, *Jurisprudence*, Vol. 6, No. 1, hlm. 16-27.
- Beliyana Shanty. 1995. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Jakarta: Liberty.
- CM Marianti Soewandi. 2003. *Buku Materi Kuliah Akademi Ilmu Pemasyarakatan, Bimbingan dan Penyuluhan Klien*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Mulyadi Lilik. 2005. *Pengadilan Anak Di Indonesia Teori Praktek Dan Permasalahannya*, Bandung: Mandar Maju.
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor E-39-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan.
- Soekanto Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sutrisno Hadi. 2007. *Metodologi Penelitian Resreach*. Jakarta: PT. Moyo Segoro Agung
- uai.ac.id/2011/04/13/pemikiran-ulang-atas-metodologi-penelitian-hukum/
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Usai Humaidi. 2012. *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Anak*. Mataram: Fakultas Hukum Mataram.